PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2011-2016

NYI MAS RIZKI OCTAVIA

8215132310

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

KONSENTRASI KEUANGAN
PROGRAM STUDI S1MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017

THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND INTELLECTUAL CAPITAL TO THE FIRM PERFORMANCE ON BANK COMPANY LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2011-2016

NYI MAS RIZKI OCTAVIA

8215132310

Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

CONCENTRATION OF FINANCIAL MANAGEMENT
STUDY PROGRAM OF MANAGEMENT
FACULTY OF ECONOMICS
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2017

ABSTRAK

Nyi Mas Rizki Octavia, 2017; Pengaruh *Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility,* dan *Intellectual Capital* terhadap *Kinerja Perusahaan* pada Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan perbankan yang dipublikasikan di BEI selama periode 2011-2016. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang dikhususkan untuk tujuan tertentu dan dengan pertimbangan mendapatkan sampel yang representatif. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Managerial ownership* tidak berpengaruh signifikan, variabel *Audit committee* berpengaruh negatif signifikan, variabel *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif signifikan dan variabel *Intellectual Capital* berpengaruh tidak signifikan.

Kata kunci : *Kinerja Perusahaan, Managerial ownership, Audit committee, Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital*.

ABSTRACT

Nyi Mas Rizki Octavia, 2017; The Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Intellectual Capital to the Firm Performance on Bank Company listed in BEI Period 2011-2016. Thesis, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta.

The purpose of this research is to know the influence of good corporate governance, corporate social responsibility and intellectual capital to the firm performance on bank company listed in BEI. The data used in this study are annual report and the financial statements of bank company that published during 2011-2016. The sampling method in this research using purposive sampling technique which the sample is selected based on criteria that are specific to a particular purpose and with consideration to get a representative sample. The research model in this study employs panel data analysis with fixed effect model approach. The empirical result shows that managerial ownership unsignificant effect, audit committee negative significant effect, corporate social responsibility positif significant effect, and intellectual capital unsignificant effect.

Key words : Firm Performance, Managerial Ownership, Audit Committee Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana, ES, M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	M. Edo S. Siregar, SE, M.BA NIP.19720125 200212 1 002	Ketua		9-8-2017
2.	Dra. Umi Mardiyati, M.Si. NIP. 19570221 198503 2 002	Sekretaris		17-8-2017
3.	Prof. Dr. Hamidah, SE, M.Si NIP. 19560321 198603 2 001	Penguji Ahli		15-8-2017
4.	Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.Si, M.Si. NIP. 19720506 200604 1 002	Pembimbing I		8-8-2017
5.	Destria Kurnianti, SE, M.Sc. NIDK. 8826100016	Pembimbing II		4-08-2017

Tanggal Lulus : 4 Agustus 2017

PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Univerditas Negeri Jakarta.

Jakarta, Agustus 2017
Yang Membuat Pernyataan

Nyi Mas Rizki Octavia
No.Reg 8215132310

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan memberikan petunjuk serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul ñ Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Intellectual Capital* terhadap *Kinerja Perusahaan* pada Perusahaan Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016è dapat terselesaikan dengan baik dan lancer. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Mamaku, papaku dan eyangku sumber motivasi dan semangat, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, nasihat, dan kekuatan yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Dr. Dedi Purwana, E.S.,M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Bapak Andrian Haro, S.Si, MM selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen.
4. Bapak Dr. Gatot Nazir Ahmad, S.Si, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbingan, dan memotivasinya sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Destria Kurnianti, SE. M.Sc, selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan motivasi serta nasihat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Prof. Dr. Hamidah, SE, M.Si., sebagai penguji ahli dalam sidang skripsi yang memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Dra. Umi Mardiyati M.Si., sebagai sekretaris dalam sidang skripsi yang memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta atas seluruh ilmu pengetahuan dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
9. Kakakku tercinta mba Kiki yang selalu memberikan dorongan, membantu mengarahkan, memotivasi, dan memberi semangat kepada penulis.
10. Bulekku, Omku, dan adik sepupuku yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
11. Refaldi Putratama yang selalu mendampingi disaat-saat penting dan membutuhkan, yang selalu mendengarkan keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi.
12. Kucing-Kucingku tersayang Snowy, Tatan, Emina, Rajo, Toa, Ole, Gendis yang selalu menemani saat bergadang dan menghibur saat merasa lelah.
13. Sahabatku Nurul Purnama, Nuur Annisa, Putri Sarah, Ratu Rika, Galih, Icha, Lala yang selalu memberikan semangat, memotivasi, dan mendoakan disaat-saat penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman Management C 2013 yang selalu berjuang bersama disaat senang maupun susah dan selalu memberi semangat.

15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dalam skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi penelitian berikutnya. Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi perbaikan tulisan ini di masa yang akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Jakarta, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK iii
ABSTRAK iv
LEMBAR PENGESAHAN v
PERNYATAAN ORISINALITAS vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 17
C. Tujuan Penelitian 17
D. Manfaat Penelitian 17
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS 19
A. Kajian Pustaka 19
1. Perbankan 19
2. Teori Keagenan (*Agency Theory*) 21
3. *Good Corporate Governance* 23
a. Pengertian *Good Corporate Governance* 24
b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* 27
c. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance* 29
d. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perbankan 30
e. Indikator *Good Corporate Governance* 32
4. Teori Legitimasi 39
5. *Corporate Social Responsibility* 42
a. Pengertian *Corporate Social Responsibility* 42
b. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* 44

c. Manfaat *Corporate Social Responsibility* 46
6. *Resource Based Theory* 48
7. *Intellectual Capital* 51
a. Pengertian *Intellectual Capital* 52
b. Indikator *Intellectual Capital* 54
c. *Value Added Intellectual Coefficient* (*VAIC*) 56
d. *Value Added Human Capital* (*VAHU*) 57
e. *Structural Capital Value Added* (*STVA*) 58
f. *Value Added Capital Employee* (*VACA*) 59
8. *Intellectual Capital* 60
a. Pengertian Kinerja Perusahaan 60
b. Tujuan Kinerja Perusahaan 62
c. Pengukuran Kinerja Perusahaan 63
B. Penelitian Terdahulu 65
C. Kerangka Teoritik 75
D. Hipotesis 83
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 85
A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 85
B. Metodologi Penelitian 85
C. Operasionalisasi Variabel Penelitian 86
1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 86
2. Variabel Bebas (Independent Variable) 88
D. Metode Pengumpulan Data 94
E. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 95
F. Metodologi Analisis 97
1. Statistik Deskriptif 97
2. Analisis Model Regresi Data Panel 98
3. Uji Asumsi Klasik 102
4. Pengujian Hipotesis 103
5. Koefisien Determinasi 104

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 105
A. Statistik Deskriptif 105
B. Uji Asumsi Klasik 110
1. Uji Multikolinieritas 110
C. Uji Regresi Data Panel 111
1. Uji Chow 111
2. Uji Hausman 112
3. Hasil Uji Hipotesis 117
4. Koefisien Determinasi 122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 123
A. Kesimpulan 123
B. Implikasi 125
C. Saran 125
DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
II.1	Penelitian Terdahulu	73
III.1	Operasionaliasi Variabel Penelitian	93
III.2	Kriteria Pemilihan Sampel	96
IV.1	Statistik Deskriptif	105
IV.2	Hasil Uji Multikolinieritas	111
IV.3	Hasil Uji Chow	112
IV.4	Hasil Uji Hausman	113
IV.8	Hasil Analisis *Fixed Effect Weighted*	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Judul** **Halaman**

II.1 Kerangka Pemikiran 83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel perusahaan perbankan

Lampiran 2 Hasil uji statistik deskriptif perusahaan perbankan

Lampiran 3 Hasil uji multikolinieritas perusahaan perbankan

Lampiran 4 Hasil uji Chow perusahaan perbankan

Lampiran 5 Hasil uji Hausman perusahaan perbankan

Lampiran 6 Hasil uji Regresi Data panel perusahaan perbankan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penilaian atau pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah negara apalagi dalam sebuah perusahaan agar mampu berkembang. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dibandingkan perusahaan pesaing, pengukuran kinerja perusahaan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan arah keberhasilan sebuah perusahaan. Untuk itu memasuki pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau dikenal dengan ASEAN *Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016 ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan Indonesia untuk mampu menjadi perusahaan yang berkembang dan *go international*.

Persaingan usaha akan semakin meningkat seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) karena mudah masuknya perusahaan negara-negara besar ASEAN ke Indonesia. Sehingga dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini pula akan menuntut Indonesia untuk memiliki perusahaan atau industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi agar tidak sekedar menjadi pasar bagi perusahaan negara-negara tetangga.[1]

[1] Kurniawati. 2016. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perbanas Institute. p.1.

Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mampu memiliki keunggulan kompetitif yang komparatif yang membuat perusahaan memiliki kelebihan dibandingkan dengan perusahaan asing yang nantinya akan semakin agresif merambah keberbagai pasar sektor industri dalam negeri. Oleh sebab itu seiring dengan pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN salah satu sektor industri yang harus mampu menghadapi persaingan yang ketat dan mempunyai prospek untuk terus berkembang di masa-masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sektor perbankan. Sehingga diharapkan dengan masuknya pemberlakuan perdagangan bebas di kawasan ASEAN, sektor perbankan di Indonesia mampu mendapatkan kemudahan akses untuk berekspansi, menciptakan produk dan jasa yang berdaya saing dan mampu membuka cabang di negara-negara ASEAN bukan justru terpuruk dan tidak dapat bersaing. Perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana diharapkan mampu menyediakan kredit kepada sektor-sektor produktif yang bersaing, apalagi di beberapa negara ASEAN memiliki suku bunga yang sangat rendah seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Perbankan memiliki kontribusi yang besar dalam menggerakan roda perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di saat perekonomian sedang krisis peran bank yang memiliki fungsi lembaga intermediasi sangatlah berpengaruh, karena jika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan jika terjadi penurunan jumlah simpanan masyarakat di bank maka akan berpengaruh pada jumlah uang beredar yang bertambah di masyarakat dan akan terjadi inflasi.[2]

Peranan bank sebagai lembaga intermediasi dalam bidang keuangan cukup strategis baik saat ini ataupun yang akan datang.[3] Berbagai perkembangan positif telah terjadi di sektor perbankan seperti pengembangan produk derivatif, investasi asing yang mulai mengalir ke Indonesia serta adanya kerjasama dengan dengan produk lembaga keuangan lain seperti reksadana dan bancassurance.[4] Selain itu semakin banyak bank-bank yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) yang memberikan indikasi bahwa semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap industri perbankan Indonesia.

Menurut data dari *Indonesian Stock Exchange* (Bursa Efek Indonesia-IDX) setiap periode saham perbankan selalu mendominasi kapitalisasi pasar, dengan persentase di atas 20%. Pada tahun 2011 kapitalisasi pasar perbankan sebesar 22,5 % dengan nominal Rp. 795.859 juta dari total keseluruhan kapitalisasi pasar seluruhnya Rp. 3.537.294 juta. Pada tahun 2012 kapitalisasi

[2] Wardiah, Mia Lasmi.2013**.** Dasar-Dasar Perbakan. Bandung : CV.Pustaka Setia. p.33-34
[3] Iskandar, Syamsu. 2013. Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah dan Valuta Asing. Jakarta :InMedia. p.85
[4] Wardiah, Mia Lasmi, *op.cit*., p. 55

pasar perbankan sebesar 21,8% dengan nominal Rp. 899.408 milyar dari total keseluruhan kapitalisasi pasar seluruhnya Rp. 4.126.995 milyar. Pada tahun 2013 kapitalisasi pasar perbankan sebesar 21,2% dengan nominal Rp. 894.282 milyar dari total keseluruhan kapitalisasi pasar seluruhnya Rp. 4.219.020 milyar. Pada tahun 2014 kapitalisasi pasar perbankan sebesar 23,4% dengan nominal Rp. 1.222.298 milyar dari total keseluruhan kapitalisasi pasar seluruhnya Rp. 5.228.043 milyar. Pada tahun 2015 kapitalisasi pasar perbankan sebesar 23,3% dengan nominal Rp. 1.132.972 milyar dari total keseluruhan kapitalisasi pasar seluruhnya Rp. 4.872.702 milyar. Sedangkan untuk tahun 2016 kapitalisasi pasar perbankan sebesar 23,3% dengan nominal Rp. 1.339.854 milyar dari total keseluruhan kapitalisasi pasar seluruhnya Rp. 5.753.613. Hal tersebut menunjukan bahwa besarnya minat investor terhadap industri perbankan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam pembelian suatu saham adalah dengan melihat kinerja perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Menurut menteri keuangan RI berdasarkan keputusan No.740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989 , bahwa yang dimaksud dengan kinerja keuangan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Tingginya minat investor terhadap saham industri perbankan menunjukan bahwa kinerja perbankan relatif baik.

Salah satu indikator untuk menentukan kinerja bank adalah dengan menganalisis rasio keuangan yaitu dengan metode *T o b i Q. ô* T s o b i Q n ô s

sebagai salah satu indikator pengukur variabel kinerja perusahaan dari perspektif investasi telah diuji di berbagai situasi manajemen puncak (dan T o b i Q n telah dikatakan sebagai indikator yang layak untuk dijadikan sebagai indikator pengukur ekonomi perusahaan.[5] T o b i n ôs Q adalah salah satu rasio penilaian (*Valuation Ratio*) yang merupakan ukuran yang paling komprehensif untuk menilai hasil kerja perusahaan, karena rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh rasio-risiko dan rasio-hasil pengembalian.[6] Rasio T o b i n ôs Q ini akan memberikan informasi seberapa besar masyarakat (investor) atau para pemegang saham dapat menghargai perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku saham.[7] Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bank untuk menilai hasil kerja dan di dalam penelitian ini faktor-faktor tersebut meliputi *Good Corporate Governance* (GCG), *Intellectual Capital* (IC), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Untuk menghadapi persaingan di kawasan ASEAN tepatnya ketika memasuki perdagangan bebas di kawasan ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana perubahan pasar akan begitu cepat, perusahaan-perusahaan di Indonesia patut untuk membenahi diri yaitu dengan cara menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.[8] Melalui penerapan GCG ini

---

[5] Wolfe, J and Sauaia, A.C. 2003. ñ*The Tobin ô s Q As A Company Performance Indicato r* ò . Developments in Business Simulation and Experiential Learning. Vol 30. p.40

[6] Sawir, Agnes. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. p.67

[7] Sutrisno, 2013. Manajemen Keuangan (Teori, Konsep, dan Aplikasi*)*.Edisi Delapan, Cetakan Kedua. Yogyakarta : EKONISIA. p.98-99

[8] Hamdani. 2016. Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis. Jakarta : Mitra Wacana Media. P.51-52

setidaknya Indonesia dapat bersaing dan sejajar dengan tata kelola perusahaan perusahaan lain di kawasan ASEAN dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.[9] Dengan memperhatikan GCG maka suatu perusahaan akan membangun hubungan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan di antara bagian-bagian penting di dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham) untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga bisa dikatakan sekarang ini manajemen di dalam perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen sudah berjalan dengan optimal dan efisien tetapi perusahaan juga perlu memastikan bahwa mereka perlu mengelola *Good Corporate Governance* (GCG) untuk membuktikan manajemen berjalan dengan baik dan kinerja perusahaan yang optimal bisa dimiliki.

Salah satu industri yang perlu menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam operasional perusahaan adalah sektor perbankan.

[9] Hamdani, op.cit., p.77

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum. Tujuan dikeluarkan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan(*stakeholders*), serta meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika (*ethics values*) yang berlaku umum pada industri perbankan. Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).[10]

Dalam mengukur *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diproksikan menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dewan direksi, *BOD Characteristics*, komite audit, komite audit independen, *board size* terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Tobin's Q*. Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial dan komite audit sebagai alat ukur *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Tobin's Q*.

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, dan ditemukan hasil yang beragam. Hasil penelitian yang

[10] Effendi, Muh Arief. 2016. The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

dilakukan oleh Arfan, dkk (2014)[11] menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tobin's Q*. Menurut penelitian dari Rizqia, dkk (2013)[12] menunjukkan bahwa *managerial ownership* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tobin's Q*. Sedangkan berdasarkan penelitian Prastuti dan Budiasih (2015)[13] kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *Tobin's Q*. Perbedaan hasil penelitian dari setiap peneliti ini dapat disebabkan karena manajer perusahaan di Indonesia khususnya pada sektor keuangan mungkin belum banyak mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan yang jumlahnya cukup signifikan, sehingga kurang memberikan kontribusi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tidak semua keuntungan dapat dinikmati oleh manajer sehingga mereka belum merasa ikut memiliki perusahaan maka dari itu tujuannya sebagai manajer akan lebih dipentingkan, dibandingkan sebagai pemegang saham. Hal tersebut juga sesuai dengan teori *entrenchment* yang dikemukakan oleh Stulz (1998)[14], menyatakan bahwa "manajer yang memiliki jumlah saham yang besar akan cenderung *entrench* pada posisinya yang berakibat pada keputusan yang diambil bersifat *non-value maximizing*

---

[11] Arfan, Muhammad, dkk. 2014. "Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Manajerial, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI". Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia, ISSN 2337-9502, Vol.2, No.1.

[12] Rizqia, Dwita Ayu, dkk. 2013. "Effect Of Managerial Ownership, Financial Leverage, Profitability, Firm Size, and Investment Opportunity On Diviend Policy and Firm Value". Research Journal of Finance and Accounting. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.4, No.11.

[13] Prastuti, Ni Ketut Karlina dan Budiasih, I Gusti Nyoman. 2015. "Pengaruh Good Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility". ISSN: 2303-1018, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 114-129.

[14] Stulz, R.M. 1988. "*Managerial control of voting nights financing policies and the market for corporate control*", Journal of Financial Economics 20, 25-54.

sehingga nilai perusahaan maupun kinerja menurun (Prastuti & Budiasih, 2015[15]; Arfan, dkk , 2014[16]; Onasis & Robin, 2016[17]).

Penelitian lain dari Bahreini dan Zain (2013)[18] menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan *audit committee* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tobin's Q*. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dari Prastuti dan Budiasih (2015)[19] menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *Tobin's Q*. Menurut penelitian Wardoyo dan Veronica (2013)[20] jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tobin's Q*. Perbedaan hasil penelitian dari setiap peneliti ini dapat disebabkan karena kemungkinan keberadaan komite audit bukan merupakan jaminan bahwa kinerja perusahaan akan semakin baik dan optimal, sehingga pasar menganggap keberadaan komite audit bukanlah faktor yang mereka pertimbangkan dalam mengapresiasikan kinerja.[21] Apalagi dengan adanya Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit sebagai investor tidak perlu melihat jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan karena dianggap perusahaan pasti sudah memenuhi peraturan tersebut. Adanya

---

[15] Prastuti, Ni Ketut Karlina dan Budiasih, I Gusti Nyoman, *loc. cit*.

[16] Arfan, Muhammad, dkk, *loc. cit*.

[17] Onasis, Kristie dan Robin. 2016. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di BEI". Bina Ekonomi. Vol. 20 No. 1.

[18] Bahreini, Mahboubeh dan Zain, Mazlina Mat. 2013. "*Impact of Corporate Governance on Performance of Banking Sector In Malaysia*". Research Journal of Finance and Accounting , ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.4, No.19.

[19] Prastuti, Ni Ketut Karlina dan Budiasih, I Gusti Nyoman, *op. cit*.

[20] Wardoyo, dkk. 2013. "Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan". Jurnal Dinamika Manajemen. Vol. 4, No. 2, 2013, pp: 132-149.

[21] Ibid., pp:133

jumlah komite audit yang kurang signifikan juga dapat menurunkan kinerja perusahaan, hal ini dimungkinkan karena komite audit yang terdapat dalam perusahaan juga merupakan anggota dari komisaris independen. Karena keterbatasan jumlah komite audit inilah maka komite audit belum mampu menjalankan perannya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan objektifitas dari Auditor (Prastuti & Budiasih, 2015[22]; Wardoyo, dkk 2013[23]).

Kenyataan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkungan masyarakat pasti memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat diberikan perusahaan yaitu seperti kemanfaatan untuk kesejahteraan dan pembangunan bagi negara sedangkan dampak negatifnya seperti *global warming*, pencemaran, dll.[24] Selain memberikan dampak positif bagi negara, selama ini pula perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti : memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi, membayar pajak, memberi sumbangan, dll.[25] Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 74 dinyatakan, bahwa ñSiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber

[22] Prastuti, Ni Ketut Karlina dan Budiasih, I Gusti Nyoman, *op. cit*.
[23] Wardoyo, dkk. *op. cit*.
[24] Hadi, Nor. 2014. Corporate Social Responsibility. Yogyakarta : Graha Ilmu.
[25] Memed, Sueb. 2001. ïPengaruh Akuntansi Sosial Terhadap Kinerja Sosial dan Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia ò Disertasi Universitas Padjadjaran Bandung.

daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ò

Salah satu perusahaan atau industri yang perlu melakukan kegiatan tanggung jawab sosial adalah perbankan. Bentuk perealisasian kegiatan tanggung jawab sosial pada industri perbankan yang sudah banyak dilakukan bagi masyarakat lingkungan sekitarnya seperti melakukan kegiatan donor darah atau kegiatan yang bersifat *charity*,contohnya memberi santunan dan sumbangan sembilan bahan pokok (sembako). Tidak hanya itu, bahkan kini bank-bank di Indonesia melakukan kegiatan sosial dalam yayasan tersendiri dan dengan bujet yang khusus seperti program CSR milik Bank Mandiri bernama *Corporate Secretary* Bank Mandiri yang inti kegiatannya adalah perusahaan akan turut berperan aktif untuk membangun masyarakat sekitar. Semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mejalankan tanggung jawab sosial mereka akan memberikan keuntungan dimasa kini maupun dimasa mendatang guna meningkatkan kinerja perusahaan dan citra perusahaan di mata masyarakat.

Tanggung jawab sosial merupakan komitmen berkelanjutan para pelaku bisnis untuk memegang teguh pada etika bisnis dalam beroperasi, memberi kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, serta berusaha mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi para pekerja,

termasuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar.[26] Dalam penelitian ini, variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI).

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang mekanisme CSR dan pengaruhnya pada kinerja perusahaan, dan ditemukan hasil yang beragam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bidhari, Salim, dan Aisjah (2013)[27] menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diproksikan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *T o b i Q*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Indrasti dan Martini (2014)[28] menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap *T o b i Q*. Hasil penelitian dari Jamali, dkk (2015)[29] menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif signifikan terhadao *T o b i Q*. Perbedaan hasil penelitian dari setiap peneliti ini dapat disebabkan karena : (1) pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap

---

[26] Holme, R and Watts,P. 2006. "Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense". World Business Council for Sustainable Development.

[27] Bidhari, Sandhika Cipta, dkk. 2013. "*Effect of CSR information Disclosure on Financial Performance and Firm Value in Banking Industry Listed at Indonesia Stock Exchange*". European Journal of Business and Management , ISSN 2222-1905, Vol.5, No. 19.

[28] Indrasti, Anita Wahyu dan Martini. 2014. "Pengungkapan Struktur Kepemilikan Saham dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi, Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga, dan Peralatan Rumah Tangga yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013". Jurnal Akuntansi dan Keuangan. ISSN: 2252 7141, Vol. 3 No.

[29] Jamali, Hisnol, dkk. 2015. "*The Influence Of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Financial Performance With Efficiency As Mediating Variable*".International Journal of Business and Management Invention. ISSN (Online): 2319 - 8028, Volume 4 Issue 5, PP-01-10.

masyarakat belum sepenuhnya dijalankan oleh kebanyakan perusahaan-perusahaan di berbagai negara, seperti Indonesia;(2) sikap *opportunities* perusahaan, yang mengganggap pelaksanaan *social responsibility* akan mengandung biaya yang cukup besar yang belum tentu memiliki relevansi terhadap pencapaian tujuan yang bersifat *economic motive*;(3) dukungan tata perundangan yang masih lemah; dan (4) standar operasional yang kurang jelas. Seharusnya perusahaan dapat menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai peningkat keunggulan kompetitif kinerja perusahaan, namun kebanyakan perusahaan hanya berfikir tentang kesejahteraan internal perusahaan tanpa melihat dampak bagi eksternal perusahaan khususnya masyarkat. Karena seharusnya konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat.[30]

Sekarang ini perusahaan yang dikatakan unggul adalah perusahaan yang tidak hanya memerlukan modal yang optimal, manajemen perusahaan yang baik, tata kelola perusahaan yang efektif ataupun kegiatan tanggung jawab sosial yang dibuat semaksimal mungkin oleh perusahaan bagi lingkungan masyarakat guna meningkatkan kualitas perusahaan di mata masyarakat. Namun kini banyak perusahaan yang awalnya mendasari bisnisnya pada tenaga kerja beralih menjadi bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge base*) karena merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mampu bersaing dan bertahan dengan perusahaan lain.

[30] Indrasti, Anita Wahyu dan Martini, *loc. cit*.

Besarnya aset pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan menjadi hal yang penting dalam pengembangan perusahaan yang didasarkan oleh pengetahuan.[31] Sehingga bisa dikatakan pengetahuan di dalam suatu perusahaan nilainya lebih berharga dan kuat dibandingkan dengan sumber daya alam, aset fisik, maupun modal/keuangan perusahaan yang banyak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar aset pengetahuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan adalah *intellectual capital*.[32] Tidak seperti aset fisik yang selama ini diketahui seperti tanah, peralatan, gedung, kendaraan, dll ï sifat dari modal intelektual adalah tidak berwujud (*intangible assets*) yaitu pengetahuan dari para tenaga kerja yang berada didalam perusahaan tersebut.

Fenomena *Intellectual Capital* (IC) mulai berkembang terutama setelah muncul PSAK No.19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19, aktiva tidak bewujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya,atau untuk tujuan administratif.[33] *Intellectual Capital* sebagai sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan future economic benefit pada perusahaan tersebut.

---

[31] Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. 2015. ñntellectual Capital dan Corporate Social Responsibility Pengaruhnya Pada Profitabilitas Perbankan ò Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.7, No.1, Maret 2015, pp. 75-84.

[32] Ibid., pp:88

[33] IAI. 2007. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Salemba Empat.

Salah satu industri yang perlu memiliki *intellectual capital* sebagai aset nirwujud (*intangible assets*) yang baik adalah perbankan untuk menciptakan nilai (*value*) perusahaan, mampu bersaing dengan perusahaan lain juga untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Karena dengan dimiliknya *intellectual capital* yaitu aset pengetahuan, perbankan mampu memiliki kelebihan yang unggul yang mampu membuatnya berbeda dari pesaingnya seperti dalam menciptakan produk atau jasa yang akan mereka tawarkan yang mampu menarik para nasabahnya. Penilaian kinerja perbankan merupakan analisis kinerja keuangan yang diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 indikator tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut: permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Dari indikator tersebut, suatu perbankan dapat dikatakan sehat apabila memiliki kualitas aset (*asset quality*) yang secara tidak langsung membuktikan bahwa kualitas modal intelektual sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam sistem operasional perbankan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini variabel *Intelletual Capital* diproksikan dengan alat ukur *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC Ê) .

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang mekanisme *Intellectual Capital* dan pengaruhnya pada kinerja perusahaan, dan ditemukan hasil yang beragam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faza

dan Hidayah (2014)[34] menjelaskan bahwa *Intellctual Capital* (IC) yang diproksikan dengan *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC Ê) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan *T o b i Q.ô* Penelitian lain yang dilakukan oleh Hejazi, dkk (2016)[35] menyatakan bahwa *Intellctual Capital* (IC) berpengaruh positif signifikan terhadap *T o b i n. ô* Sedangkan menurut penelitian Riyandini, dkk (2016)[36] menyatakan bahwa *Intellctual Capital* (IC) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan *T o b i Q.* Perbedaan hasil penelitian dari setiap peneliti ini dapat disebabkan karena di berbagai negara, seperti Indonesia belum memberikan perhatian lebih terhadap *intellectual capital*. Banyak perusahaan juga belum mengelola *intellectual capital* tersebut dengan baik dan benar untuk dijadikan sebagai penilaian atas kinerja perusahaan, serta sebagai informasi tambahan dalam pengambilan keputusan karena kebanyakan diantara mereka masih menggunakan cara konvensional dalam membangun bisnisnya dan bukan berbasis pada *knowledge* juga kurang memberikan perhatian terhadap *human capital, structural capital* dan *customer capital*.[37]

---

[34] Faza, Muhammad Fardin dan Hidayah, Erna. 2014 . Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas, Produktivitasm dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di B E I ò . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. ISSN:1907-9109, Vol. VIII, No. 2, Juni 2014, hal. 186 ï199.

[35] Hejazi, Rezvan, dkk. 2016. ï*Intellectual, Human and Structural Capital Effects on Firm Performance as Measured By Tobin ô Q* ò. Knowledge and Process Management. Vol. 23, No. 4, pp 259 ï273.

[36] Riyandini, Putri, dkk. 2016. ïPengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan yang Diintervensi Oleh Kinerja Keuangan Pada Perusahaan yang Listing di BEI (Studi Empiris Pada Sub Sektor Perbankan Periode Tahun 2011-2014) ò. Bina Ekonomi. ISSN. 2460-6561.

[37] Faza, Muhammad Fardin dan Hidayah, Erna, *op. cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (*GCG)* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility CSR)* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah *Intellectual Capital (IC)* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah *Good Corporate Governance (GCG)* mempengaruhi kinerja perusahaan.
2. Untuk menguji apakah *Corporate Social Responsibility CSR)* mempengaruhi kinerja perusahaan.
3. Untuk menguji apakah *Intellectual Capital (IC* mempengaruhi kinerja perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa
   a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa khususnya bagi mahasiswa jurusan manajemen keuangan.
   b. Sebagai referensi dalam pembelajaran atau pembuatan karya tulis.
2. Bagi akademik

a. Sebagai sumber referensi dalam pengajaran dan bahan dokumentasi penelitian.

b. Menambah informasi dan menjadi sumber informasi untuk dibagi kepada para mahasiswa tentang yang terjadi pada kondisi keuangan aktual pada sebuah perusahaan.

3. Bagi perusahaan

a. Sebagai bahan evaluasi untuk terus menjaga kinerja perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Perbankan

Bank merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat . Bank merupakan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam arti luas adalah perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds). Peranan lembanga keuangan adalah perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Bank juga merupakan lembaga pemghimpun dana, yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas yang dapat perupa *demand deposit* (giro), *saving deposit* (tabungan), dan *time deposit* (deposito). Berbagai variasi lain yang dapat dilakukan oleh bank bergantung pada manajemen bank tersebut, dalam rangka bersaing dengan bank-bank lainnya untuk memberikan produk dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat luas.[38]

Sesuai dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

[38] Wardiah, Mia Lasmi, *op. cit*.

rakyat banyak. Menurut pasal 1 Undang-Undang No.4 tahun 2003 tentang perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Pengertian strtategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan balas jasa yang menarik dan menguntungkan kepada nasabahnya.[39]

Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, di samping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, bank berfungsi sebagai perantara keuangan, dakam hal ini faktor ñKepercayaan ò arid masyarakat merupaka faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan.[40] Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro
b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk usaha-usaha produktif.

[39] Wardiah, Mia Lasmi, *op. cit.*
[40] Kasmir. 2015. Manajemen Perbankan. Edisi Revisi. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern. Kontribusi ilmu manajemen modern, menjadi babak baru lahirnya teori agensi(*Agency Theory*).[41] Teori keagenan ini pertama kali diungkapkan oleh Jensen and Meckling pada tahun 1967. Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) perusahaan.[42]

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*.[43] Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai *principal* menyewa individu atau organisasi lain yang disebut sebagai *agent* , untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada *agent* tersebut.[44] Satu atau lebih *principal* memberi wewenang dan otoritas kepada *agent* untuk melakukan kepentingan. Dalam suatu korporasi, yang disebut principal adalah pemegang saham yang akan menyediakan dana dan fasilitas untuk menjalankan perusahaan serta mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan *agent*. Sedangkan *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. *Principal* memiliki harapan bahwa *agent* akan menghasilkan

---

[41] Hamdani, *op. cit.*

[42] Jensen, M.C and Meckling, W.H. 1976. ñ*Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* ò. Journal of Financial Economics. Oktober, 1976, V.3, No.4, pp. 305-360.

[43] Hamdani, *op. cit.*

[44] Brigham, Eugene F. Dan Houston, Joel F., 2011. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Buku 1. Edisi 11, diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto, Salemba Empat, Jakarta, hal 68 ð 69.

return dari uang yang mereka investasikan dan manajemen akan memberikan laporan mengenai informasi perusahaan kepada principal.

Asumsi teori keagenan menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keaganan (*agency problem*).[45] *Agency theory* memunculkan pula argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik perusahaan (pemegang saham atau *owner*) dengan para manajer yang mengelola perusahaan. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan (*conflict interest*) di antara kedua belah pihak. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).[46] Menurut Jensen dan Meckeling (1967)[47], adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

a. *The monitoring expenditure by the principle,* yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi prilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
b. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.

---

[45] Hamdani, *op. cit.*
[46] Ujiyantho, Arif Muh. Dan B. A. Pramuka.2007. ñMekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan ò Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
[47] Jensen, M.C and Meckling, W.H, *op. cit.*

c. *The residual loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

Sehubungan dengan teori keagenan, maka pihak yang paling berkepentingan terhadap kinerja manajemen adalah pemilik (*shareholders*). Untuk kepentingan pemilik itulah dewan komisaris dibentuk dan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah dengan mekanisme *Corporate Governance* yang tepat. Mekanisme *Corporate Governance* yang tepat diharapkan manajemen akan dapat memenuhi tanggungjawabnya sehubungan dengan kepentingan pemilik dan tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai para pemegang saham.

3. *Good Corporate Governance* (GCG)

Untuk menghadapi persaingan di kawasan ASEAN, perusahaan khususnya Indonesia patut berbenah diri. Upaya ini dalam rangka memenangkan persaingan pasar di kawasan ASEAN. Untuk menghadapi perubahan pasar yang begitu pesat, perusahaan di Indonesia harus mampu menjalankan tata kelola bisnis dengan baik. Tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah istilah yang sering dipakai perusahaan pada umumya. Melalui penerapan GCG ini setidaknya Indonesia dapat sejajar dengan tata keola perusahaan di kawasan ASEAN dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (Hamdani, 2016). Penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance)* merupakan

salah satu pilar utama dalam rangka menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) bukanlah istilah baru, melainkan konsep lama yang kembali populer karena adanya perkembangan sosial dan kemajuan praktik bisnis. GCG di kawasan Asia mulai dibicarakan sekitar akhir 1990-an, pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di kawasan Asia. Sementara GCG di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997, memuncak pada saat krisis ekonomi melanda yang disinyalir akibat lemahnya implementasi GCG dan etika yang melandasinya.[48]

Penerapan GCG dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu etika dan peraturan pendekatan etika (*ethical driven*) yang datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sementara, pendekatan peraturan

[48] Hamdani, *op. cit.*

(*regulatory driven*) justru memaksa perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.[49]

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah kumpulan hukum, peraturan, kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Lembaga *Corporate Governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)[50] mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepetingan pihak petaruh lainnya.

---

[49] Hamdani, *op. cit.*

[50] The Indonesian Institute for Corporate Governance(IICG). 2000. Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jakarta: Prentice Hall.

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Menurut beberapa pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem di dalam perusahaan yang diciptakan untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewjaran dan kesetaraan. Jika suatu perusahaan mampu membuat suatu tata kelola yang baik maka perusahaan mampu mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang kompetitif, bersih, transparan, bertanggung jawab dan profesional. Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik akan menciptakan peningkatan kinerja perusahaan yang optimal melalui terbentuknya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholders*. Selain itu dengan diberlakukannya penerapan *Good Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam memperoleh dana pembiayaan karena adanya faktor kepercayaan dan keyakinan dari para

investor terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan nilai perusahaan dimata para *stakeholder*.[51]

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

GCG diperlukan dalam rangka menciptakan pasar efisien, transparasi, akuntabilitas, reponsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan kepada semua pemangku kepentingan.[52] Menurut Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)[53] menguraikan 4 prinsip dalam *Corporate Governance*, yaitu :

1) *Fairness* (Keadilan)

Fairness menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Prinsip *Fairness* diharapkan untuk membuat seluruh *asset* perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. Penegakan prinsip *Fairness* mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

---

[51] Kurniawati, *op. cit.*
[52] Hamdani, *op. cit.*
[53] Organization for Economic Cooperation and Development (2004). "OECD Principles of Corporate Governance 2004". The OECD Paris.

2) *Transparency* (Transparansi)

Transparency mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Prinsip *Transparency* diharapkan dapat membantu *stakeholder* dalam menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen.

3) *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip *Accountability* menjelaskan oeran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Beberapa bentuk implementasi dari prinsip *Accountability* adalah adanya praktek audit internal yang efektif serta menjelaskan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa depan. Apabila prinsip ni diterapkan secara efektif maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris serta direksi.

4) *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibility berarti bahwa sebuah perusahaan harus memenuhi dan mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Termasuk di

dalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, hak-hak konsumen, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Sebuah perusahaan tidak hanya harus bertanggungjawab terhadap mereka yang berhubungan dengan perusahaan, tetapi mereka juga yang tidak berhubungan secara langsung dengannya.

Di dalam suatu perusahaan penerapan *good corporate governance* tidak hanya memerlukan realisasi prinsip-prinsi GCG saja, namun penerapan *good corporate governance* perlu juga didukung oleh tiga pilar yang saling behubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.[54]

c. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan Corporate Governance yang baik di dalam perusahaan merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market convidence*) dan nilai pasar (*market value*) serta mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang. Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

[54] Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Govenance Indonesia.

1) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah
2) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3) Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang
4) Mendorong pengelolaan perbankan secara professional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS
5) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6) Menjaga *Going Concern* perusahaan.

d. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Perbankan

Berdasarkan pengalaman pada saat terjadi krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan GCG agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta Bank dapat lebih tahan dalam menghadapi krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko

(*Risk Based Bank Rating*/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi yang antara lain mencakup penilaian faktor GCG.[55]

Untuk itu kemudian Bank Indonesia (BI) pada tanggal 30 Januari 2006 menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Tujuan PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan dari pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika (*ethics values*) yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam ketentuan ini, GCG merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam ketentuan yang mulai berlaku sejak diterbitkan tanggal 30 Januari 2006 ini, setiap bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG, menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala, dan kemudian akan dinilai oleh Bank Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 2, ayat 1 disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip

[55] Hamdani, *op. cit.*

GCG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setidaknya harus diwujudkan dalam 7 (tujuh) hal, yaitu sebagai berikut :

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank.
3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
5) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
6) Rencana strategis bank.
7) Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank dimasa kini maupun dimasa mendatang, melindungi kepentingan dari para pemangku kepentingan, dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.[56]

e. Indikator *Good Corporate Governance*

1) Kepemilikan Manajerial

Dalam menjalankan usaha, pemegang saham sebagai pihak prinsipal melimpahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer sebagai

[56] Effendi, Muh Arief, *op. cit*.

pihak agen dengan harapan bahwa manajer bertindak atas nama pemilik untuk mencapai tujuan perusahaan.[57] Namun kenyataannya, pihak manajer cenderung bertindak demi kepentingan pribadi dan hal inilah yang mengakibatkan terciptanya konflik agensi.[58] Salah satu upaya perusahaan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mensejajarkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik.[59] Upaya tersebut ditempuh melalui mekanisme good corporate governance. Mekanisme good corporate governance merupakan alat tidak langsung bagi pihak prinsipal untuk mengontrol biaya keagenan yang ditimbulkan oleh pihak agen. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan mampu menghasilkan laporan keuangan yang mengandung informasi laba yang berkualitas.[60] Terdapat beberapa mekanisme yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai good corporate governance,diantaranya adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional perusahaan. [61]

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen direktur dan komisaris yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan.[62] Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi

---

[57]Wida, Ni Putu P.D dan Suartana, I Wayan. 2014. ñPengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Nilai Perusahaan ò E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.3 (2014): 575-590.

[58] Senda, Fransiska Dhoru. 2011. ñPengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Leverage Financial dan Investment Opportunity Set Terhadap Nilai Perusahaan ò Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

[59] Imanta, Dea. 2011. ñFaktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Manajerial ò Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 13 (1), hal : 67-80.

[60] Wida, Ni Putu P.D dan Suartana, I Wayan, *op. cit.*

[61] Nuraina, Elva. 2012. ñPengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) ò Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). 19 (2), hal : 110-125.

[62] Wahidahwati. 2002. ñPengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Kebijakan Hutang Perusahaan : Sebuah Perspektif Theory Agency ò Simposium Nasional Akuntansi IV.

yang menggambarkan adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajerial dalam perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen, sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik. Kinerja dan motivasi karyawan dapat ditingkatkan dengan adanya kepemilikan manajerial, hal ini disebabkan oleh manajer yang akan lebih memikirkan dengan matang setiap tindakan yang akan diambilnya.[63]

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan manajerial juga dapat dijadikan mekanisme yang mengendalikan perilaku oportunistik manajer dalam manipulasi laba, sehingga kualitas laba yang dilaporkan dapat diandalkan dan akhirnya dapat berdampak terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan.[64] Oleh karenanya, kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme GCG yang dapat mempengaruhi insentif bagi manajemen untuk melaksanakan kepentingan terbaik bagi pemegang saham. [65]

---

[63] Jensen, M.C and Meckling, W.H, *op. cit.*

[64] Arfan, Muhammad, dkk, *loc. cit*.

[65] Midiastuty, Pratana P., dan Mas. Ud Machfoedz. 2003. ñAnalisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba ò Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI. Surabaya.

Hal ini berarti bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerja untuk kepentingan para pemegang saham dan dirinya sendiri, selain itu dapat mendorong manajer untuk menciptakan adanya kinerja perusahaan yang optimal, serta dapat memotivas manajer untuk lebih bertanggung jawab dan juga lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga masalah keagenan dapat diminimalisasi.[66] Berikut ini adalah fungsi dan level kepemilikan manajerial dalam perusahaan[67]:

a) Low *levels of managerial ownership* (0%-5%)

Secara empiris, perilaku *insiders* ini berhubungan dengan *managerials holdings* dan nilai perusahaan. Manajemen dalam level ini apabila kinerja mereka baik lebih cenderung lebih memilih paket kompensasi seperti opsi saham dan *stock grants* dari pada menambah jumlah kepemilikan saham diperusahaan sendiri.

b) *Intermadicate levels of managerial ownership* (5%-25%)

Di level ini, *insiders* mulai menunjukkan perilaku sebagai pemegang saham. Dengan bertambahnya kepemilikan maka semakin besar jumlah hak suara mereka. Jika *low levels of managerial ownership* lebih memilih rencana kompensasinya sedangkan *intermediate levels of managerial ownership* lebih memilih mengambil kendali perusahaan.

---

[66] Kurniawat, *op. cit*.

[67]Soesetio, Yuli. 2008. "Kepemilikan manajerial dan institusional, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang." Jurnal Keuangan dan Perbankan. 12.3. 384-398.

c) *High levels of managerial owneship* (40%-50%)

Di level ini, kepemilikan *inseders* tidak memiliki otoritas penuh terhadap perusahaan dan disiplin eksternal tetap berlaku.

d) *High levels of managerial owneship* (greaters than 50%)

Di level ini, *inseders* memiliki wewenang penuh terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan diatas 50% adanya tekanan dari disiplin eksternal (*outside shareholders*) hampir tidak ada sehingga mengakibatkan menurunya nilai perusahaan.

e) *Very high levels of managerial ownership*

Di level ini perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal.

2) Komite Audit

Mengingat tugas komisaris dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan cukup berat, maka komisaris dapat dibantu oleh beberapa komite, satu diantaranya yaitu komite audit. Pembentukan beberapa komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*-GCG) di perusahaan. Pembentukan komite tersebut harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dewan komisaris. [68]

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)[69] mendefinisikan komite audit sebagai berikut : Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan , dengan demikian,

[68] Effendi, Muh Arief, *loc. cit.*
[69] Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). 2010. Komite Audit.

tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance (KNGCG)[70] pada 30 Mei 2002, antara lain disebutkan bahwa :

1. Tujuan dibentuknya komite audit adalah :
    a. Pelaporan keuangan

        Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit eksternal, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.

    b. Manajemen risiko dan kontrol

        Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol

    c. Tata kelola perusahaan

[70] Komite Nasional Good Corporate Governance (KNGCG). 2002. Pedoman Umum Good Corporate Govenance

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

2. Tanggung jawab komite audit di bidang tata kelola perushaan adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan manipulasi terhadap pegawainya. Dalam hal tata kelola perusahaan, peran dan tanggung jawab komite audit harus termasuk juga :
    a. Mengawasi proses tata kelola perusahaan;
    b. Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan tata kelola perusahaan;
    c. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*;
    d. Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat memengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan;
    e. Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku;

f. Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan tata kelola perusahaan dan temuan lainnya.

Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit.[71]

4. Teori Legitimasi

Perusahaan bisa ada dan diterima dalam lingkungan suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan saat menjalankan bisnis mereka harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, seperti halnya pemerintah, perusahaan memiliki kontrak sosial (social contract) yang berisi sejumlah hak dan kewajiban. Kontrak sosial itu akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi masyarakat. Namun, apa pun perubahan yang terjadi, kontrak sosial tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Kontrak sosial ini pula yang akan menjadi wahana bagi perusahaan

[71] Effendi, Muh Arief, *op. cit.*

untuk menyesuaikan berbagai tujuan perusahaan dengan tujuan-tujuan masyarakat yang pelaksanaannya dimanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.[72]

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.[73] Legitimiasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

Definisi legitimasi menurut Deegan (2002)[74] adalah: *ñé ystems-oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, and in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclosure*

---

[72] Ramadhani, Laras Surya. 2012. ïPengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di B E I Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro, Semarang.

[73] Hadi, Nor, *op. cit.*

[74] Deegan, Craig., et al. 2002. ï*Examination of The Corporate Social Environmental Disclosure of BHP from 1983-1997: A Test of Legitimacy Theory* ò Accounting, Auditing, and Accountability Journal, Vol.15,No.3, pp. 312-343.

are considered to represent one important means by witch management can influence external perceptions about organization ò

Definisi di atas mencoba menggeser secara tegas perspektif perusahaan ke arah stakeholder orientation (society). Batasan tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitikberatkan pada stakeholder perspective (masyarakat dalam arti luas).

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran masyarakat dan lingkungan, perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan tersebut baik produk, metode, dan tujuan. Legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian (*incongruence*), maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.[75]

Aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya.[76] Terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi, yaitu: (1) aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (*congruence*) dengan sistem nilai di masyarakat;

---

[75] Ibid. p.352

[76] Dowling, J. and Pfeffer, J. 1975. ñ*Organizational Legitimacy: Social Values An Organizational Behavior* ò Pacific Sociological Journal Review, Vol. 18.

(2) pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.

5. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

a. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sulit dipungkiri, bahwa pergerakan industrialisasi berdampak negatif terhadap lingkungan dan pranata sosial sekitarnya. Hal itu karena industrialisasi membutuhkan perputaran dalam penggunaan sumberdaya sehingga kecil ataupun besar, cepat atau lambat dapat mengganggu keseimbangan sumberdaya tersebut. Disitulah letak pentingnya pembagian tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, agar terjadi keseimbangan eksploitasi.

Saat ini tanggungjawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan sehingga setiap perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*.[77] Pentingnya CSR telah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 74 dinyatakan, bahwa ñSetiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab

[77] Hartoyo. 2016. ñAnalisis Pengaruh Profitabilitas, Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013*)* à Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ò Dengan demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan, bukan kegiatan yang bersifat sukarela.

Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan integrasinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum.[78]

Lord Holme and Richard Watts (2006) [79]medefinisikan ñ*Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at l a r g e* ò

Definisi menurut Lorde Holme and Richard Watts (2006)[80] tersebut mengandung makna mendalam, bahwa tanggungjawab sosial merupakan komitmen berkelanjutan para pelaku bisnis untuk memegang teguh pada etika bisnis dalam beroperasi, memberi kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, serta berusaha mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi para pekerja, termasuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar.

---

[78] Darwin, Ali. 2004. Corporate Social Responsibility (CSR), Standards & Reporting. Seminar Nasional Universitas Katolik Soegijapranata.

[79] Holme, R and Watts,P, *op. cit*.

[80]Ibid.

Tanggungjawab sosial memiliki muatan strategis dalam mendukung konstruksi strategi perusahaan guna mewujudkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).[81] Definisi CSR menurut Suharto (2010)[82], adalah ñKepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesiona l ò .

b. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dapat diuraikan menjadi tiga, yaitu: [83]

1) ***Sustainability***, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

[81] Khasali, Rhenald. 2008. Manajemen Public Relations. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
[82] Suharto, Edi. 2010. ñMembangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial ò Bandung : Rafika Aditama.
[83] David, Crowther. 2008. Corporate Social Responsibility. Guler Aras & Ventus Publishing ApS.

2) ***Accountability***, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketikaaktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.[84] Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan. Nor Hadi (2009)[85] menunjukkan bahwa tingkat keluasan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi.

3) ***Transparency***, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparasi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak ekternal, yang berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.[86]

[84] Ibid.
[85] Hadi, Nor, *loc. cit.*
[86] David, Crowther, *op. cit*.

c. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Wibisono (2007)[87] menguraikan 10 manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika melakukan program Corporate Social Responsibility, yaitu:

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan image perusahaan.

2) Layak Mendapatkan *sosial licence to operate.*

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

3) Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan *stakeholders* akan menganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *Corporate Social Responsibility.* Oleh karena itu, pelaksanaan *Corporate Social*

[87] Wibisono, Yusuf. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Surabaya : Media Grapka.

Responsibility sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders* yang perlu mendapat perhatian.

4) Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records yang baik dalam pengelolaan *Corporate Social Responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

5) Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

6) Mereduksi Biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan Corporate Social Responsibility. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

7) Memperbaiki Hubungan dengan Stakehoder

Implementasi Corporate Social Responsibility akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana

komunikasi ini akan semakin menambah trust stakeholders kepada perusahaan.

8) Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Image perusahaan yang baik di mata stakeholders dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

10) Peluang Mendapatkan Penghargaan

6. Resource Based Theory

Resource-based theory dipelopori oleh Penrose pada tahun 1959, yang mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan bersifat heterogen dan jasa produktif yang berasal dari sumber daya perusahaan memberikan karakter unik bagi tiap-tiap perusahaan. Pemikiran tersebut didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Wernerfelt (1984)[88] bahwa tindakan strategis membutuhkan seperangkat sumber daya fisik, keuangan, human,

[88] Wernerfelt, B., 1984. ñA *Resource-Based View of the Firm* ò Strategic Management Journal. [e-journal] 5(2)

atau organisasional khusus dan dengan demikian keunggulan kompetitif ditentukan oleh kemampuannya memperoleh dan mempertahankan sumber daya.

Menurut *Resource Based Theory* (RBT), perusahaan memperoleh keuntungan kompetitif dan mencapai kinerja yang unggul dengan memiliki, memperoleh, dan menggunakan aset strategis secara efektif. Aset-aset strategis yang dimaksud mencakup aset berwujud berupa aset fisik, dan aset tidak berwujud yang telah dimiliki, dikembangkan, dan digunakan perusahaan dalam mempertahankan strategi yang kompetitif dan menguntungkan.[89] Barney (1991)[90] mengatakan bahwa aset tidak berwujud dapat diperlakukan sebagai aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi perusahaan karena sifatnya yang berharga, sulit ditiru, langka dan sukar untuk disubtitusi dengan hal lain.

Menurut *Resouce Based Theory, intellectual capital* memenuhi kriteri- kriteria sebagai sumber daya unik yang mampu menciptakan keungguan kompetitif perusahaan sehingga dapat menciptakan *value added* atau nilai tambah bagi perusahaan. Dari penjelasan *resource based theory* di atas, *intellectual capital* merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan digunakan untuk menyusun dan menerapkan strategi perusahaan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Sebuah perusahaan dikatakan

---

[89] Ibid.

[90] Barney, J. B., 1991 . *Firm resources and sustained competitive advantage* . Journal of Management, Vol. 17, pp.99-120.

mempunyai keunggulan kompetitif apabila dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam industrinya. Namun lebih lanjut dikatakan hal yang paling penting adalah menjaga keberlanjutan dari keunggulan kompetitif tersebut atau yang biasa disebut sebagai sustained competitive advantage.[91] Keunggulan kompetitif dalam RBT merupakan penciptaan *abnormal profit* (Peteraf 1993)[92] atau tingkat kembalian di atas rata-rata (*above average returns*) dengan memanfaatkan fitur-fitur khusus yang dimiliki perusahaan.[93]

Resource-based theory menjelaskan adanya dua pandangan mengenai perangkat penyusunan strategi perusahaan.[94] *Pertama*, yaitu pandangan yang berorientasi pada pasar (*marketbased*) dan yang *kedua* adalah pandangan yang berorientasi pada sumber daya (*resource-based*). Pengembangan dari kedua perangkat tersebut menghasilkan suatu pandangan baru, yaitu pandangan yang berorientasi pada pengetahuan (*knowledge-based*). *Knowledge-based theory* menganggap pengetahuan sebagai sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan, karena pengetahuan merupakan aset yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. pelanggan.

---

[91] Barney, J. B., dan Clark, D. N. 2007. ñResource-Based View Theory: Creating and Sustaining Competitive Advantage ò. Oxford University Press Inc, New York.

[92] Peteraf, M. A. 1993. ñ*The Corner Stones of Competitive Advantage: A ResourceBased View* ò. Strategic Management Journal , 179-191.

[93] Lin, C. and Huang, C. (2011). Measuring Competitive Advantage with an Asset-Light Valuation Model. African Journal of Business Management, 5(13), 5100-5108.

[94] Sangkala. 2006. Intellectual Capital Management. Jakarta: YAPENSI

7. Intellectual Capital

Untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangannya tentu tidaklah mudah. Perusahaan harus mampu memaksimalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Di era globalisasi seperti sekarang ini, untuk memenangi persaingan bisnis, perusahaan tidak bisa jika hanya mengandalkan aset berwujud saja. Aset berwujud seperti sumber daya alam (SDA) misalnya, lama-kelamaan jumlahnya semakin menipis dan pada saatnya nanti akan habis.

Aset tidak berwujud atau Intangible Asset, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan aset berwujud atau Tangible Asset, salah satunya adalah aset tidak berwujud memiliki umur ekonomis lebih panjang dan dapat diperbaharui. Menyadari akan pentingnya peranan aset tidak berwujud yang berkontribusi nyata terhadap keunggalan kompetitif, para pelaku bisnis mulai berusaha untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan efektif dan efisien.

Ada beberapa informasi-informasi lain yang perlu disampaikan kepada pengguna laporan keuangan, yaitu mengenai adanya nilai lebih yang dimiliki perusahaan. Nilai lebih tersebut berupa adanya inovasi, penemuan, pengetahuan, perkembangan karyawan, dan hubungan yang baik dengan para konsumen, yang sering diistilahkan sebagai *Knowledge Capital* (Modal Pengetahuan) atau *Intellectual Capital* (Modal Intelektual).[95]

---

[95] Prasetio, Ferandi. 2015. ïPengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan ò Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro, Semarang.

a. Pengertian *Intellectual Capital*

Salah satu definisi IC yang paling banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)[96] yang menjelaskan IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak berwujud : (1) *organisational (structural) capital*; dan (2) *human capital.* Lebih tepatnya, *organisational (structural) capital* mengacu pada hal seperti sistem software, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. *Human capital* meliputi sumber daya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan *supplier.*

Intellectual capital atau modal intelektual memiliki peran yang sangat penting dan strategis di perusahaan. Stewart (1997) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai *ñintellectual capital as the intellectual material that has been formalized, capture and leveraged to create wealth by producing a higher value assets* à Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan *future economic benefit* pada perusahaan tersebut. Jadi inti dari keberadaan *intellectual capital* adalah pengetahuan itu sendiri yang didukung proses informasi untuk menjalin hubungan dengan pihak luar.

[96] Organization for Economic Cooperation and Development, *loc. cit.*

Koistra dan Zijlstra (2001)[97] mendefinisikan modal intelektual sebagai material yang telah diformalkan, diperoleh, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan aset yang bernilai lebih tinggi. Stewart (1997) menyatakan modal intelektual sebagai *intellectual material*, yang meliputi pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, dan pengalaman yang dapat digunakan secara bersama untuk menciptakan kekayaan (*wealth*).

Pendapat ini serupa dengan pendapat Sawarjuwono (2003)[98] yang menyatakan bahwa *intelellectual capital* merupkan jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (*human capital, structural capital, dan customer capital*) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. Hong (2007)[99] mengartikan *intellectual capital* sebagai aset berbasis pengetahuan dalam perusahaan yang menjadi basis kompetensi inti perusahaan yang dapat mempengaruhi daya tahan dan keunggulan bersaing.

Intellectual capital mewakili sumber daya yang bernilai dan kemampuan untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan.[100] Namun

---

[97] Meer-Kooistra, Jetje Van Der dan Siebren M. Zijlstra. 2001. Reporting on Intellectual Capital. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 14 (4): pp: 456-76.

[98] Sawarjuwono, T. Dan A.P. Kadir. 2003. ñIntellectual Capital : Perlakuan, Pengukuran, dan Pelaporan ò Jurnal Akuntansi dan Keuanga.5 (1) 35-57.

[99] Hong, Pew Tan, et al. 2007. ñ*Intellectual Capital and Financial Returns of Companies* ò Journal of Intellectual Capital. Vol.8, No.1, 76-95.

[100] Nahapiet, Janine & Ghoshal, Sumantra. 1998. ñ*Social Capital, Intellectual Capital and The Organizational Advantage* ò The Academy of Management Review: Apr 1998. Vol.23, No.2, pp. 242-266.

demikian, Dzinkowski (2000)[101] berpendapat bahwa *intellectual capital* merupakan hasil akhir dari proses transformasi pengetahuan atau pengetahuan itu sendiri yang ditransformasikan ke dalam *intellectual property* atau *intellectual assets* perusahaan.

b. Indikator *Intellectual Capital*

Berikut ini adalah tiga indikator atau komponen dari Intellectual Capital yaitu Capital Employed Efficiency, Human Capital Efficiency dan Structural Capital Efficiency[102]:

1) *Capital Employed Efficiency* (CEE)

Firer dan William (2003)[103] menjelaskan bahwa capital employed atau physical capital adalah suatu indikator value added yang tercipta atas modal yang diusahakan dalam perusahaan secara efisien. Capital employed merupakan tingkat efisiensi yang diciptakan oleh modal fisik dan keuangan. Hal ini memperlihatkan semakin tinggi nilai capital employed suatu perusahaan maka semakin efisien pengelolaan modal intelektual berupa bangunan, tanah, peralatan, atau pun teknologi yang dengan mudah dibeli dan dijual di pasar pada perusahaan yang bersangkutan.

---

[101] Dzinkowski, R..2000. ñ*The Measurement and Management of Intellectual Capital; An Introduction Management Accounting* ò Journal of Intellectual Capital. p.32-36.

[102] Simarmata, Rhoma. 2015. ñPengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ò Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

[103] Firer, S dan Williams, S.M. 2003. ñ*Intellectual Capital dan Traditional Measures of Corporate Performance* ò Journal of Intellectual Capital. Vol.4, No.3, pp. 348-360.

2) *Human Capital Efficiency* (HCE)

Tobing (2007)[104] menjelaskan pengertian human capital sesuai dengan Skandia Value Scheme, bahwa human capital mencakup semua kapasitas individual, talenta, knowledge, dan pengalaman dari pekerja dan manager serta kompetensi, kapabilitas, relationship, dan values dari karyawan. Bontis (2000)[105] menambahkan bahwa elemen dari manusia adalah kemampuan dalam belajar, berubah, berinovasi, dan memunculkan ide kreatif yang dapat mendukung keberlangsungan organisasi jangka panjang. Widyaningrum (2004)[106] Human capital merupakan aktiva tak berwujud yang dimiliki perusahaan dalam bentuk kemampuan intelektual, kreativitas dan inovasi-iovasi yang dimiliki oleh karyawannya.

3) *Structural Capital Efficiency* (SCE)

Penjelasan dari Tobing (2007)[107] yang berdasarkan Skandia Value Schememenyatakan bahwa structural capital merupakan intellectual capital yang tetap ada dalam perusahaan ketika pekerja pensiun atau berhenti, seperti sistem infrastruktur pendukung, sistem fisik yang digunakan untuk mengirim dan meningkatkan intellectual

---

[104] Tobing, Paul. 2007. Knowledge Management : Konsep, Arsitektur, dan Implementasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.

[105] Bontis, N, et al. 2000. ³*Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries*´ Journal of Intellectual Capital, 1 (1), pp. 85-100.

[106] Widyaningrum, Ambar. 2004. ³Modal Intelektual´ Departemen Akuntansi FEUI Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol 1, pp. 16-25

[107] Tobing, Paul, *op. cit*.

capital, basis data dan basis knowledge. Widyaningrum (2004)[108] structural capital meliputi kemampuan perusahaan untuk menjangkau pasar atau hardware, software, dan lain-lain yang mendukung perusahaan. Dengan kata lain merupakan sarana prasarana pendukung kinerja karyawan.

c. *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)*

Metode VAIC dikembangkan oleh Pulic (1998), model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added (VA). VA adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Menurut Tan et al. (2007)[109], output (OUT) mempresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue. Hal penting di dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (labor expenses) tidak termasuk dalam IN dikarenakan peran aktifnya di dalam proses value creation, sehingga tidak dihitung sebagai biaya (cost) (Pulic, 1999).

Komponen utama dari VAIC Ê yang dikembangkan Pulic (1998) tersebut dapat dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu physical capital (VACA ï Value Added CapitalEmployed), human capital (VAHU ï Value

[108] Widyaningrum, Ambar, *loc. cit.*
[109] Tan et al. 2007. ï*Intellectual capital and financial returns of companies* à Journal of Intellectual Capital.Vol. 8 No. 1, 2007 pp. 76-95.

Added Human Capital), dan structural capital (STVA ï Structural Capital Value Added). VAIC juga dikenal sebagai Value CreationEfficiency Analysis, dimana merupakan sebuah indikator yang dapat digunakan dalam menghitung efisiensi nilai yang dihasilkan oleh perusahaan yang didapat dengan menggabungkan CEE (Capital Employed Efficiency), HCE (Human Capital Efficiency), dan SCE (Structure Capital Efficiency) (Pulic, 1998).

d. Value Added Human Capital (VAHU)

Value Added Human Capital (VAHU) adalah salah satu komponen VAIC yang mencerminkan *total value added* terhadap total *salary and wage cost* perusahaan. Stewart (1997) menjelaskan bahwa human capital adalah kemampuan karyawan untuk menciptakan produk yang dapat menjaring konsumen sehingga konsumen tidak akan berpaling pada pesaing. Human capital mempresentasikan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia dan menganggap manusia atau karyawan sebagai aset strategic perusahaan karena pengetahuan yang mereka miliki.

VAHU adalah seberapa besar *Value Added* (VA) dibentuk oleh pengeluaran pekerja dalam rupiah. Hubungan antara VA dan Human Capital (HC) mengindikasikan adanya kemampuan HC di dalam membuat nilai pada sebuah perusahaan. Ketika VAHU dibandingkan lebih dari sebuah kelompok perusahaan, VAHU menjadi sebuah indikator kualitas sumber daya manusia perusahaan. VAHU juga diartikan sebagai kemampuan

perusahaan di dalam menghasilkan VA dari setiap rupiah yang dikeluarkan kepada HC.[110]

e. *Structural Capital Value Added* (STVA)

Menurut Yudianti (2000)[111], *structural capital* merupakan sarana untuk mengubah human capital menjadi kesejahteraan perusahaan/organisasi. Salah satu bagian dari structural capital adalah membangun sistem seperti data base yang memungkinkan orang-orang dihubungkan dan belajar satu sama lain, sehingga menumbuhkan sinergi karena adanya kemudahan berbagi pengetahuan dan bekerja sama antar individu dalam organisasi. Penciptaan dari structural capital ini berhubungan dengan pengetahuan atau nilai dari seseorang yang tidak akan begitu saja hilang jika yang bersangkutan meninggalkan perusahaan karena pengetahuannya telah dirangkum dalam data base, sehingga perusahaan tidak akan kehilangan nilainya.

Structural capital value added (STVA) menunjukkan kontribusi structural capital (SC) dalam proses penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan *value added* (VA) dan merupakan suatu indikasi seberapa sukses SC di dalam proses penciptaan nilai.[112] Dalam model Pulic, SC diperoleh dari VA dikurangi dengan *human capital* (HC). SC bukan merupakan ukuran independen

[110] Kuryanto, Benny dan M. Syafruddin, *op. cit*.
[111] Yudianti, Ninik. 2000. ñPengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta ò Juni. Malang.
[112] Kuryanto, Benny dan M. Syafruddin, *op. cit*.

seperti HC. SC bergantung pada proses penciptaan value added perusahaan dan mempunyai proporsi nilai yang berkebalikan dengan HC. Hal ini berarti bahwa semakin besar proporsi nilai HC dalam proses penciptaan nilai maka semakin kecil proporsi nilai SC.

f. *Value Added Capital Employed* (VACA)

ValueAdded Capital Employed (VACA) adalah salah satu komponen VAIC yang mencerminkan *book value* dari *net assets* perusahaan.[113] *Capital employed* menunjukkan hubungan harmonis yang dimiliki perusahaan dengan mitranya, baik yang berasal dari pemasok yang andal dan berkualitas, pelanggan yang loyal dan merasa puas dengan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, serta hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar.[114]

VACA adalah perbandingan antara *value added* (VA) dengan modal fisik yang bekerja (capital employed). Pulic(1999) mengasumsikan, jika satu unit *capital employed* (CA) dapat menghasilkan *return* yang lebih besar pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut mampu memanfaatkan CA dengan lebih baik. Pemanfaatan CA dengan lebih baik merupakan bagian dari *intellectual capital* perusahaan.[115]

---

[113] Chen, Ming-Chin, Shu Ju Cheng, Yuhchang Hwang. 2005. ñ*An Empirical Investigation of The Relationship Between Intellectual Capital and Firm`s Market Value and Financial Performance* ò Journal of Intellectual Capital. Vol 6, No.2, pp. 159-176.

[114] Riahi-Belkaoui, A, *op. cit.*

[115] Kuryanto, Benny dan M. Syafruddin, *loc. cit*.

8. Kinerja Perusahaan

a. Pengertian Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba[116], sedangkan menurut IAI (2007:3)[117] kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai ñperforming measurement ò, yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan indikator yang menggambarkan keadaan yang terjadi di perusahaan dilihat dari segi ekonomi. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka dapat diasumsian bahwa perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan segala sumberdaya yang dimilikinya seefektif dan seefisien mungkin. Kinerja keuangan perusahaan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi para stakeholder.[118]

---

[116] Sucipto. 2003. ñPenilaian Kinerja Keuangan ò Jurnal Akuntansi. Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

[117] IAI. 2007. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta : Salemba Empat.

[118] Prasetio, Ferandi. 2015. ñPengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan ò Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro, Semarang.

Kinerja keuangan perusahan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Prestasi perusahaan yang ditunjukkan oleh laporan keuangannya sebagai suatu tampilan keadaan perusahaan selama periode tertentu disebut dengan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Pranata (2007)[119] menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan akan sulit tercapai bila perusahaan tersebut tidak bekerja secara efisien, sehingga perusahaan tidak mampu baik langsung maupun tidak langsung bersaing dengan perusahaan sejenis.

Menurut Sucipto (2003)[120] pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Hanafi, 2015:69)[121]. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat

[119] Pranata, Y. 2007. ñPengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan ò Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
[120] Sucipto. 2003. ñPenilaian Kinerja Keuangan ò Jurnal Akuntansi. Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
[121] Hanafi, Mahmud H. Halim. 2015. Manajemen Keuangan. Edisi 1, Cetakan Delapan, Yogyakarta : BPFE.

prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.[122]

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Perusahaan

Adapun tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2004:31)[123] adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan

[122] Simarmata, Rhoma, *op. cit.*
[123] Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4. Liberty, Yogyakarta.

5) Mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

c. Pengukuran Kinerja Perusahaan

Untuk mengetahui kinerja yang dicapai oleh perusahaan maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Ukuran kinerja yang umum digunakan yaitu ukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan digunakan rasio-rasio keuangan. Berbagai rasio dapat digunakan, tetapi dalam penelitian ini digunakan metode Tobin ô s Q sebagai rasio penilaian (*Valuation Ratio*) yang merupakan ukuran yang paling komprehensif untuk menilai hasil kerja perusahaan, karena rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh rasio-risiko dan rasio-hasil pengembalian

James Tobin, ekonom peraih Nobel telah merumuskan teori investasi yaitu tarif investasi (*rate of investment*) dengan pendekatan neraca, dimana hargasaham atau *market value of a firm*, dibandingkan dengan nilai aset

yang didasarkan pada *replacement cost* dikurangi dengan utang, rasio ini dikenal dengan nama Tobin atau rasio Q.

Tobin Q merupakan salah satu indikator pengukur variabel kinerja perusahaan dari perspektif investasi telah diuji di berbagai situasi manajemen puncak (Wolfe, and Sauaia,2003) [124] dan Tobin Q telah dikatakan sebagai indikator yang layak untuk dijadikan sebagai indikator pengukur ekonomi perusahaan. Tobin Q merupakan salah satu rasio penilaian (*Valuation Ratio*) yang merupakan ukuran yang paling komprehensif untuk menilai hasil kerja perusahaan, karena rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh rasio-risiko dan rasio-hasil pengembalian.[125] Menurut Sutrisno (2013)[126] rasio ini akan memberikan informasi seberapa besar masyarakat (investor) atau para pemegang saham dapat menghargai perusahaan, sehingga mereka mau membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku saham. Rasio Tobin Q sebagai salah satu alternatif jenis rasio yang menggunakan perbandingan harga pasar dengan nilai buku perusahaan (*price to book value*).[127]

[124] Wolfe, J and Sauaia, A.C, *loc. cit.*
[125] Sawir, Agnes. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
[126] Sutrisno, *loc. cit.*
[127] Pohan, H. T. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. Skripsi Fakultas Ekonomi .Trisakti.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh *good corporate governance, corporate social responsibility, dan intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain, sehingga hasil dari penelitian sebelumnya bisa dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti:

1. Prastuti dan Budiasih (2015)[128]

   Dalam penelitiannya yang berjudul ñ*Pengaruh Good Corporate Governance Pada Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Corporate Social Responsibili t y* ò penelitian memperoleh data dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 ï 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 45 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda serta regresi moderasi. Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan dengan T o b i n ô s Q, sedangkan, variabel independennya adalah *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility* sebagai pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

[128] Prastuti, Ni Ketut Karlina dan Budiasih, I Gusti Nyoman, *op. cit.*

kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

2. Arfan, Darwanis dan Susanti (2014)[129]

   Dalam penelitiannya yang berjudul ñ*Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Manajerial, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*ò, penelitian memperoleh data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007 ï 2011 dengan jumlah sampel sebanyak 70 perusahaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan menggunakan metode dokumentasi, dan analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan dengan T o b i Q, sedangkan variabel independennya adalah kinerja keuangan, kepemilikan manajerial, dan *corporate social responsibility*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

[129] Arfan, Muhammad, dkk, *op. cit.*

3. Rizqia, Aisjah dan Sumiati (2013) [130]

Dalam penelitiannya yang berjudul ñ*Effect of Manajerial Ownership, Financial Leverage, Profitability, Firm Size and Investment Opportunity on Dividend Policy and Firm Value* ò, penelitian memperoleh data dari perusahaan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006 ï 2011 dengan jumlah sampel sebanyak 45 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cencus method.* Variabel dependen penelitian ini adalah *dividend policy* dan *firm value* yang diproksikan dengan DPR dan Tobin ô s seQa, sedangkan variabel independennya adalah *manajerial ownership, financial leverage, profitability, firm size* dan *investment opportunity*. Hasil penelitian ini menunjukka